

BAB I

PENDAHULUAN

Bab. I ini merupakan bagian awal disertasi berisi uraian tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian serta struktur organisasi disertasi. Dengan dikemukakan hal-hal tersebut maka akan lebih dipahami apa latar belakang dan masalah yang diangkat dalam penelitian ini serta tujuan dan manfaat atau signifikansi serta struktur organisasi disertasi ini.

A. Latar Belakang Penelitian

Pada millenium ketiga di abad ke -21 yang tengah berjalan saat ini terdapat berbagai masalah berskala lokal, nasional maupun global. Masalah-masalah global yang paling serius yang dihadapi diantaranya adalah perlunya investasi besar dalam bidang intelektual manusia menghadapi persaingan dan kompleksitas permasalahan yang ada. Toffler (1981:18) pernah mengatakan bahwa dunia sekarang ini memasuki samudera kehidupan gelombang ketiga. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa gelombang ketiga membawa tekanan-tekanan yang mendorong perubahan-perubahan mendasar, antara lain salah satunya di bidang *sociosphere* yang mengakibatkan ledakan organisasi masyarakat yang mengubah struktur dari vertikal menjadi horizontal, serta berkembangnya *civil society*. Suwondo (2005:18) memaknai *civil society* sebagai masyarakat yang beradab (*civilized society*) yang lebih menganut aturan-aturan yang berkaitan dengan sistem hukum dari pada aturan-aturan yang bersifat otoriter. Dalam dunia yang mengalami perubahan pesat itu Naisbit (1990:19) memberi istilah bahwa

dewasa ini banyak terjadi paradoks. Hal demikian itu bisa terjadi juga pada tataran berpikir sehingga sering muncul hal-hal yang kontroversial termasuk isu-isu yang menuntut untuk dihadapi sebagai konsekuensi dari kekompleksitasan masalah dalam realitas yang senantiasa terus mengalami perkembangan.

Pernyataan Toffler jika dicermati secara kritis dan dihubungkan dengan perkembangan di Indonesia sudah terbukti terutama setelah terjadinya reformasi di bidang politik dan hukum sehingga ledakan organisasi masyarakat sungguh terjadi dan ini menimbulkan perkembangan baru di dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga apa yang dikemukakan Soewondo tentang *civil society* apabila dikaitkan dengan organisasi masyarakat dan LSM di Indonesia menunjukkan bahwa ada perkembangan *civil society* yang cukup signifikan sebagai wujud partisipasi warga negara di negara demokrasi.

Berkaitan dengan kekompleksitasan yang berkembang di era abad ke-21 ini Habib (1994) menunjukkan kekompleksitasan di bidang ekonomi, seperti yang terjadi dalam struktur internasional yang ditandai oleh struktur multipolar. Selaras dengan kompleksitas perkembangan permasalahan kewarganegaraan, Wahab (2011:13-14) mengemukakan bahwa perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di era global telah terjadi pergeseran dari penekanan pada kebenaran yang bersifat *monovision* kepada *multivision* yang implikasinya pada tuntutan berpikir secara kompleks pula sehingga cara-cara berpikir linear sering menjadi tidak relevan lagi. Adanya sejumlah keterampilan yang dituntut untuk dimiliki setiap warga negara dalam hidup di abad ke-21 ini, sudah barang tentu memberikan implikasi pada dunia pendidikan untuk menyesuaikan dan meresponnya. Berkaitan dengan masalah itu Soemantri (2011) dalam *The making of innovative human resources* mengedepankan *characteristics of innovative human resources* yang unsurnya

adalah *hard skills* dan *soft skills* yang menurutnya harus diperhatikan dalam proses pembelajaran.

Pendapat Habib dan Wahab di atas sebenarnya merupakan fenomena di era yang semakin mengglobal dimana kekuatan baik ekonomi maupun politik semakin mencair atau memencar akibat demokratisasi dan kebebasan yang menimbulkan persaingan di dalam masyarakat baik secara nasional maupun internasional. Dan justru itulah Soemantri memberi tekanan pada perlunya penyiapan sumber daya manusia yang inovatif melalui pendidikan dengan memperhatikan unsur *hard skills* dan *soft skills* khususnya dalam proses pembelajaran.

Berkaitan dengan hal di atas, UNESCO telah menyatakan bahwa belajar pada abad 21 harus didasarkan kepada empat pilar yaitu: (1) *Learning how to know*, (2) *Learning to do*, (3) *Learning to be*, (4) *Learning how to live together*. Keempat hal tersebut disebutnya sebagai empat soko guru dari pembangunan sumber daya manusia abad 21 untuk menghadapi arus informasi dan kehidupan yang terus menerus berubah. Hampir senada dengan empat pilar yang dikemukakan UNESCO itu, Maftuh (2010:5) sebagaimana juga Trilling dan Fadel (2009) mengemukakan pula sejumlah keterampilan yang harus dimiliki dalam abad ke-21, diantaranya yaitu tentang *critical thinking and problem solving*. Tuntutan keterampilan abad ke 21 oleh *Partnership for 21st century* dirumuskan sebagai berikut: *thinking, reasoning and innovation skills*, yang meliputi: (a) *critical thinking*, (b) *systems thinking*, (c) *problem solving*, (d) *creating and innovating*. (Maftuh:2010:5)

Empat keterampilan utama abad ke 21 oleh Metiri Group (2009) sebagaimana juga dalam Maftuh (2010:6) dirumuskan sebagai “berpikir inventif-modal intelektual” yang

meliputi: (a) adaptabilitas/mengelola kompleksitas dan kemandirian (*self direction*), (b) keingintahuan, kreativitas dan keberanian mengambil resiko, (c) berpikir pada tatanan yang lebih tinggi dan bernalar.

Memahami apa yang dikemukakan UNESCO, Maftuh dan Metiri Group di atas bangsa-bangsa di dunia termasuk di dalamnya bangsa Indonesia sangat bergantung pada beberapa aspek diantaranya yang menyangkut karakter seperti cara berpikir, sebaran dan keefektifan pendidikan yang diterima masyarakat dan penggunaan sains dan teknologi secara bijaksana. Oleh karena itu tujuan utama pendidikan yang diperlukan adalah mempersiapkan manusia untuk mengarahkannya dalam mengisi kehidupan secara bijaksana, efektif dan bertanggungjawab. Dalam kaitannya dengan tujuan utama pendidikan itu Wahab (2007:45) menyatakan bahwa di era globalisasi dan abad informasi ada implikasi yang menuntut kemampuan tertentu dari setiap individu dalam kedudukannya sebagai warga negara. Begitu juga NEA sejak tahun 1937 dalam (Wahab:2007:46) mengemukakan bahwa para pemuda membutuhkan sesuatu hal untuk tumbuhnya kemampuan berpikir rasional, menyatakan pikiran secara jelas, dan membaca serta mendengar dengan penuh pemahaman.

Masih kaitannya dengan tujuan utama pendidikan khususnya yang berkaitan dengan berpikir, Wahab (2007:48) menambahkan bahwa guru terkadang hanya menggunakan cara berpikir konvergen sedang berpikir divergen sangat kurang pada hal berpikir divergen sangat penting bagi siswa. Dengan demikian memperhatikan tujuan pendidikan dan berbagai tuntutan serta pandangan para ahli yang telah dikemukakan di atas, pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam semua bidang merupakan sesuatu yang menantang dan memiliki tujuan yang bersifat mendasar. Namun sayangnya sebagaimana

dikemukakan Sapriya (2008:42-43) saat ini belum banyak muncul kesadaran yang tinggi di kalangan pendidik di persekolahan untuk mengajar para siswa tentang kondisi dunia yang semakin berkembang pesat yang menuntut adanya respon dengan pemikiran secara kritis. Oleh karena itu menurutnya diharapkan pembelajaran dengan ketrampilan berpikir kritis di kelas merupakan cara yang paling tepat untuk menjawab tantangan ini.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pengembangan keterampilan berpikir kritis yang juga dapat dipandang sebagai salah satu unsur pembentukan karakter bangsa Indonesia sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai salah satu pilar kebangsaan khususnya di dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 alinea yang keempat terdapat salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu: "Mencerdaskan kehidupan bangsa". Sudah barang tentu keterampilan berpikir kritis merupakan unsur penting bagi pembentukan karakter bangsa sangat tepat dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan karena salah satu komponen dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah *civic skills*, yang termasuk didalamnya yaitu *intellectual skills*.

Dalam kaitannya dengan itu, Pendidikan Kewarganegaraan semestinya tidak hanya mengembangkan pemahaman/pengetahuan (*civic knowledge*) saja tapi juga mengembangkan berpikir kritis (*civic skills*) agar siswa/mahasiswa dapat berpikir bagi dirinya sendiri untuk menghadapi kehidupan menuju masa depan dan berpartisipasi secara baik (*civic participation*). Hal itu berarti pendidikan harus mempersenjatai peserta didik untuk dapat menghadapi perkembangan dan dunia yang semakin terbuka sehingga dimampukan berpartisipasi dalam masyarakat dan dengan demikian pendidikan juga dapat melindungi masyarakat yang semakin terbuka dan sangat kompleks.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya pengembangan berpikir kritis di dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang disebabkan antara lain masih kurang dipahaminya oleh sebagian pengajar (sebagaimana yang penulis ketahui ketika melakukan studi pendahuluan penelitian ini) mengenai model pembelajaran yang bagaimana yang memberi fokus pada pengembangan berpikir kritis itu, pada hal berpikir kritis merupakan tuntutan di dalam PKn termasuk tuntutan di era globalisasi. Santoso (1992:39) menyoroti dari sisi kultural dengan mengatakan bahwa dari segi budaya, pemikiran atau sikap kritis ada yang menolak karena pemikiran kritis dianggap serangan, menjatuhkan martabat dan berbagai segi negatif lainnya terutama di dalam masyarakat yang masih feodalistis, paternalistik dan otoriter. Begitu juga yang dirasakan oleh Liliarsari (2010:457) yang memprihatinkan kondisi sosial seperti tawuran pelajar, mahasiswa, antar kampung, antar etnis, sikap konsumeristik akibat iklan. Menurutnya setiap anggota masyarakat haruslah berkualitas dalam arti memiliki kemampuan berpikir (kritis) sehingga tidak gampang terpengaruh baik oleh isu-isu yang tidak jelas dan iklan-iklan yang ditayangkan di berbagai media elektronik.

Keprihatinan Liliarsari mengenai kondisi sosial sebagaimana dikemukakan di atas bisa dipahami karena fenomena yang mewarnai kehidupan di dalam masyarakat Indonesia dan yang sebagaiannya terjadi di dunia persekolahan yaitu tawuran, konflik, kekerasan memang sering terjadi. Pertanyaannya apakah ini merupakan akibat dari berkembangnya radikalisme di masyarakat atau dunia persekolahan? Menurut data hasil penelitian indeks kerentanan radikalisme di Indonesia pada tahun 2011 yang dirilis oleh Birru (2011) di Media Center pada 15 Oktober 2011 adalah 43,6. Memang menurun 1,44 dibanding pada tahun sebelumnya yang memiliki indeks 45,4. Meskipun demikian,

Yosaphat Haris Nusarastriya, 2013

Pengembangan Berpikir Kritis Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Menggunakan Project Citizen (Studi Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis Di Universitas Kristen Satya Wacana)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

statusnya masih rentan dan masih jauh di bawah tingkat aman yaitu pada level 33,3. Indeks radikalisme ini diperoleh dari hasil penelitian kerentanan radikalisme terhadap 33 provinsi dengan jumlah responden sebanyak 4840.

Selanjutnya Al Muhtar (2010:834) sebagaimana juga dikemukakan oleh Abdul Karim (2011:8) melalui pidato pengukuhan Guru Besarnya mencatat bahwa kualitas pendidikan masih lemah dengan ditandai oleh salah satu cirinya yaitu proses pendidikan yang memberikan sebanyak mungkin bahan pelajaran untuk mencapai target kurikulum, sedangkan kapasitas berpikir tidak ditingkatkan kepada taraf yang optimal (*higher order thinking skills*). Keprihatinan semacam itu juga muncul dari Sanusi (1998:222-227) dalam pembahasannya mengenai perspektif pendidikan Ilmu (Pengetahuan) Sosial yang mengemukakan bahwa pengajaran IPS di sekolah cenderung menitikberatkan pada penguasaan hafalan dan pencapaian tujuan kognitif yang “mengulit bawang” dan dominannya latihan berpikir taraf rendah.

Kritikan tajam muncul dari Pitalokasari (2012) yang dimuat di media Suara Merdeka 29 September 2012 yang menyoroti proses pembelajaran kaitannya dengan kualitas lulusan Perguruan Tinggi yang mengatakan: “jika dosen masih menggunakan metode mengajar konvensional, maka kurikulum sebagus apa pun tidak bisa membentuk lulusan yang berkualitas”. Menanggapi pernyataan yang keras tersebut penulis mengerti maksudnya bahwa mengajar perlu variasi dalam prosesnya sehingga jangan hanya didominasi oleh guru/dosen melainkan ada inovasi sehingga terjadi keseimbangan antara pendekatan *teacher centre strategies*, *material centre strategies* dan *student centre strategies*.

Yosaphat Haris Nusarastriya, 2013

Pengembangan Berpikir Kritis Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Menggunakan Project Citizen (Studi Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis Di Universitas Kristen Satya Wacana)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Harapan senada juga datang dari Sumantri (2009) yang disampaikan dalam seminar nasional: “*Aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam membina warga Negara Indonesia di masa depan*” di Aula UPI Bandung yang kemudian dipertegas dalam kegiatan Pra Kuliah S3 Sekolah Pasca Sardjana Prodi Kewarganegaraan bahwa pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan harus memperhatikan aspek psikologi dan falsafah pendidikan dengan perlu membangun spirit berpikir di dalamnya. Hal itu tentu dimaksudkan supaya mendidik itu jangan hafalan saja yang dikedepankan tetapi mengajar harus dengan pemahaman atau pengertian serta memahami jalan pikirannya.

Dari beberapa pandangan di atas sebagaimana dikemukakan Soemantri (2011), Sumantri (2009), Wahab (2010), Al Muhtar (2010), Sapriya (2008), Liliyasi (2010), Abdulkarim (2010), Sanusi (1998), Santoso (1992) yang melihat kelemahan dalam proses pembelajaran, jika ditarik intinya ialah bahwa spirit berpikir dan pemberian tekanan pada berpikir kritis masih kurang.

Dari sisi lain beberapa kelemahan yang mempengaruhi pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Budimansyah (2009:18) sebagaimana telah dikemukakan dalam pidato Pengukuhan Guru Besarnya antara lain menyangkut proses pembelajaran dan penilaian yang lebih menekankan pada dampak instruksional (*instructional effects*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content matter*), atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja sehingga dimensi-dimensi lainnya seperti afektif dan psikomotorik serta pemerolehan dampak pengiring belum mendapat perhatian. Hal lain adalah menyangkut pengelolaan kelas yang dikatakan belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa/mahasiswa.

Dari studi kepustakaan yang penulis lakukan menunjukkan bahwa penelitian pengembangan berpikir lebih banyak dilakukan di bidang Ilmu Pengetahuan Alam dan sangat kurang untuk bidang studi kewarganegaraan atau bidang sosial lainnya pada hal *civic skills* dalam hal ini berpikir kritis tidak boleh diabaikan karena di era global dengan permasalahan di bidang kewarganegaraan yang kompleks pasti berdampak pada tuntutan pemikiran yang kompleks. Kecenderungan global dengan permasalahan yang kompleks itu secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pula konsep dan pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan khususnya yang menyangkut model pembelajaran dan *civic skills*. Berdasarkan kecenderungan Pendidikan Kewarganegaraan di era global, output dari Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menampilkan sosok pengetahuan warga negara yang integratif dari hasil sinergi pengetahuan, keterampilan, dan *civic virtue* (nilai) secara fungsional.

Terintegrasinya antara pengetahuan, keterampilan, dan *civic virtue* secara fungsional akan menghasilkan kompetensi yang diharapkan seperti berpikir secara kritis dan bertindak secara efektif, serta pandai dalam menjawab permasalahan di seputar isu-isu sosial kemasyarakatan. Disamping dapat menjawab permasalahan di seputar isu-isu sosial itu, siswa/mahasiswa juga akan dapat memahami sumber isu dan alternatif jawaban terhadap isu, serta kemungkinan akibat dari jawaban-jawaban terhadap permasalahan/isu tersebut berdasarkan sosok pengetahuan warga negara (*a body of civic knowledge*) yang integratif itu.

Pendidikan kewarganegaraan di era reformasi misalnya harus dapat melakukan pergeseran paradigma pembelajarannya ke arah paradigma baru yang menunjukkan Pendidikan Kewarganegaraan di era Indonesia baru. Di dalam paradigma sekarang (era

setelah reformasi) Pendidikan Kewarganegaraan menurut Wahab (2010:709) lebih diupayakan untuk menyiapkan warga negara yang demokratis, cerdas dan religius. Itu berarti makna “*warga negara yang baik*” yang merupakan arah dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan masa lalu menurutnya dapat lebih diperjelas pada pengertian “*warga negara yang demokratis dan berkarakter*”. Untuk memenuhi tuntutan baru sebagaimana tuntutan-tuntutan ketrampilan berpikir dan memecahkan masalah dalam hidup di abad 21 yang telah dirumuskan berbagai kalangan di atas, diperlukan inovasi pembelajaran yang dapat mengembangkan dan membiasakan berpikir secara kritis.

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) sadar betul mengenai pentingnya kemampuan berpikir kritis ini sehingga dimasukkan dalam statuta pendirian UKSW agar dapat diwujudkan dalam kegiatan-kegiatannya (termasuk dalam proses belajar-mengajar). Para pendiri UKSW menempatkan pentingnya berpikir kritis ini dalam kerangka menjadi universitas *magistorum et scholarium* untuk pembentukan minoritas yang berdaya cipta (*creative minority*) bagi pembangunan dan pembaharuan masyarakat dan negara Indonesia.

Pernah UKSW mengembangkan berpikir kritis dengan nama “dialog kritis” melalui pengajaran beregu dalam wadah Departemen Matakuliah Umum (DMU), termasuk di dalamnya Pendidikan Kewarganegaraan yang dulu namanya masih Pendidikan Kewiraan yang nanti di dalam Bab IV penulis kemukakan secara skematis. Namun dengan adanya berbagai perubahan yang terjadi maka proses perkuliahan kembali ke proses yang lebih konvensional dengan para pengajarnya masing-masing dan pengembangan berpikir kritis kurang terwadahi secara melembaga khususnya dalam proses pembelajaran karena sudah terintegrasi dengan pengajar yang bersangkutan.

Mengapa *Project citizen*? Alasannya yaitu ada alasan subyektif dan alasan objektif. Secara subyektif sebagaimana yang pernah penulis lihat dan alami sendiri ketika mengikuti pelatihan *Project ciizen* di UPI, memang ada sesuatu yang menarik khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan berpikir kritis. Daya tarik itu pada cara kerja baik itu dalam mencari data, membuat porto folio baik tayangan maupun dokumen sangat menunjang cara kerja ilmiah. Kemudian secara objektif telah dikemukakan oleh orang lain serta hasil penelitian terdahulu misalnya hasil penelitian dalam lingkup lokal seperti pada hasil penelitian Suabuana dan Maksun menunjukkan bahwa pada kelas-kelas *Project citizen* menunjukkan lebih baik dibanding pada kelas konvensional. Begitu juga pada aras internasional sebagaimana dilaporkan oleh *International Democratic Educational Institute* (Craddock et.al, 2007) berkesimpulan bahwa *Project citizen* memberikan dampak/pengaruh bagi pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan siswa. Meskipun demikian, ruang lingkup (jangkauan) dan derajat pengaruh ini sangat beragam di antara berbagai kawasan di beberapa Negara.

Disamping itu alasan yang lain sebagaimana dikemukakan Budimansyah (2009:22-25) mengenai desain pembelajarannya menarik bagi penulis karena memadukan secara sinergis model-model “*social problem solving*” (pemecahan masalah), *social inquiry* (penelitian sosial), *social involvement* (perlibatan sosial) *cooperative learning* (belajar bersama), *simulated hearing* (simulasi dengar pendapat), *deep dialogue and critical thinking* (dialog mendalam dan berpikir kritis), *value clarification* (klarifikasi nilai), *democratic teaching* (pembelajaran demokratis)” sehingga menghasilkan belajar yang berbobot dan bermakna secara pedagogis *value-based* (berbasis nilai), *challenging* (menantang), *activating* (mengaktifkan), and *joyfull* (menyenangkan)”.

Dari beberapa hal di atas termasuk alasan subjektif maupun objektif mengapa *Project citizen*, maka penelitian ini hendak mencoba mengembangkan berpikir kritis dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dalam hal ini UKSW juga menggunakan *Project citizen*. Penelitian ini dilatarbelakangi dan berkaitan dengan masalah serta tujuan sebagaimana dirumuskan di bawah ini.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas dengan berbagai tantangan ke depan serta kondisi yang ada kaitannya dengan berpikir kritis dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut :*Bagaimana Pengembangan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan Project Citizen di Universitas Kristen Satya Wacana?*

Rumusan masalah di atas dapat dijabarkan ke dalam beberapa rumusan berikut:

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa mengenai elemen berpikir kritis (sikap positif untuk berpikir kritis, kemampuan berpikir kritis dan karakteristik berpikir kritis) ?
2. Adakah perbedaan yang signifikan mengenai sikap positif untuk berpikir kritis antara mahasiswa yang mendapat perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan dengan *project citizen* dan mahasiswa yang mendapat perkuliahan secara konvensional?
3. Adakah perbedaan yang signifikan mengenai kemampuan untuk berpikir kritis antara mahasiswa yang mendapat perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan dengan *project citizen* dan mahasiswa yang mendapat perkuliahan secara konvensional?

4. Adakah perbedaan yang signifikan mengenai karakteristik berpikir kritis antara mahasiswa yang mendapat perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan dengan *Project citizen* dan mahasiswa yang mendapat perkuliahan secara konvensional?
5. Bagaimana pengembangan berpikir kritis menggunakan *Project citizen* dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ?
6. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala bagi pengembangan berpikir kritis?
7. Faktor determinan apa yang mempermudah pengembangan kemampuan berpikir kritis menggunakan *Project Citizen*?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran tentang: *Pengembangan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Menggunakan Project Citizen di Universitas Kristen Satya Wacana*. Disamping tujuan umum penelitian ini secara khusus memaparkan tujuh hal sebagaimana dipaparkan dibawah ini yaitu untuk mengetahui:

1. pemahaman mahasiswa mengenai elemen berpikir kritis (sikap positif untuk berpikir kritis, kemampuan berpikir kritis dan karakteristik berpikir kritis)
2. perbedaan sikap positif untuk berpikir kritis antara mahasiswa yang mendapat perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan *Project citizen* dengan mahasiswa yang mendapat perkuliahan secara konvensional
3. perbedaan kemampuan berpikir kritis antara mahasiswa yang mendapat perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan *Project citizen* dengan mahasiswa yang mendapat perkuliahan secara konvensional

4. perbedaan karakteristik berpikir kritis antara mahasiswa yang mendapat perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan *Project citizen* dengan mahasiswa yang mendapat perkuliahan secara konvensional
5. pengembangan berpikir kritis menggunakan *Project citizen* dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
6. faktor yang menjadi kendala bagi pengembangan berpikir kritis.
7. faktor determinan dalam *Project Citizen* yang mempermudah pengembangan berpikir kritis.

D. Manfaat /Signifikansi Penelitian

Mengenai manfaat atau signifikansi dari penelitian ini secara teoritis ialah memperkuat sisi akademis – ilmiah bagi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), khususnya yang berkaitan dengan keterampilan (*civic skills*) mengingat struktur keilmuan/mata pelajaran kewarganegaraan mencakup dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*). Sedangkan secara praktis penelitian ini menyumbangkan konsep pembelajaran yang mendekatkan mahasiswa dengan pemahaman dan pengalaman konkrit dalam kaitannya dengan berpikir kritis menghadapi berbagai permasalahan di bidang kewarganegaraan.

Kemampuan/ketrampilan menghadapi dan memecahkan permasalahan melalui analisis menuntut kemampuan berpikir kritis warga negara terutama sebagai wujud dari *civic skills* yang juga berimplikasi pada *civic disposition* tanpa harus meremehkan dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang di dalamnya terdapat

konsep, pengertian, teori, metode yang dapat membantu memahami, menganalisis, memecahkan masalah di bidang kewarganegaraan.

Di UKSW sendiri penelitian ini berkaitan erat dengan semangat dan cita-cita sebagai "*universitas scientiarum*" yang harus mencari kebenaran mentransenden batas-batas kelas, masyarakat dan negara. *Magistra dan scholaria* dituntut tidak hanya menghafalkan atau memproduksi, tetapi untuk meningkatkan pengetahuan mereka secara metodis demi mencapai cara berpikir kreatif dan kritis.

E. Struktur Organisasi Disertasi

Struktur organisasi disertasi ini mencakup Bab. I sampai Bab.V yang masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan berisi latar belakang penelitian yang mengemukakan tuntutan, keprihatinan dan realitas yang menjadi tantangan kaitannya dengan pengembangan berpikir kritis dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang menarik untuk dilakukan penelitian. Selain itu juga identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian serta struktur organisasi disertasi. Dengan dikemukakan hal-hal tersebut maka akan lebih memahami apa latar belakang dan masalah yang diangkat dalam penelitian ini serta tujuan dan manfaat atau signifikansi serta struktur organisasi disertasi ini.

Bab II. Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian memaparkan tentang konsep Pendidikan Kewarganegaraan baik dilihat dari sisi filosofis, historis – yuridis dan dari sisi pedagogis. Selanjutnya mengenai berpikir dan berpikir kritis dikemukakan tentang paradigma berpikir ditinjau dari sisi historis, berpikir pada umumnya, berpikir ilmiah, tingkat-tingkat berpikir, model-model berpikir, berpikir

kreatif dan berpikir kritis itu sendiri. Dalam bab ini juga dikemukakan kaitan antara berpikir kritis dan model pembelajaran yang antara lain meliputi berpikir kritis dan pembelajaran konvensional, berpikir kritis dan pembelajaran inovatif, serta pembelajaran PKn dan tuntutan berpikir kritis. Secara konsep juga dikemukakan tentang pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam PKn menggunakan *Project citizen* khususnya di Perguruan Tinggi. Dalam bab ini juga dibandingkan dan dikontraskan antara hasil dan temuan para peneliti sejenis yang pernah dilakukan kemudian memposisikan penelitian ini diantara penelitian yang telah dilakukan. Hal terakhir dalam bab ini mengemukakan hubungan antar variabel dalam penelitian yaitu terutama antara aspek positif sebagai landasan berpikir kritis, kemampuan berpikir kritis serta karakteristik berpikir kritis dengan *Project citizen*.

Bab III. Metode Penelitian, menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan metodologi penelitian yang mencakup: pendekatan, metode penelitian itu sendiri, populasi dan sampel, jenis data, pengembangan instrumen dan teknik analisa data. Bagian ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan penelitian, seperti bagaimana cara memperoleh data, dimana dilakukan penelitian, melibatkan siapa dan bagaimana data diolah. Dengan kata lain bagian ini memberi gambaran mengenai bagaimana cara penelitian itu dilakukan dan bagaimana penelitian ini mencapai hasil dan tujuan.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi dua hal utama yaitu pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, hipotesis, tujuan penelitian dan pembahasan atau analisis temuan. Pengolahan data penelitian ini dilakukan secara kuantitatif menggunakan

statistik dan uji hipotesis dilakukan sebagai bagian dari analisis data. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan atau analisis temuan yang dikaitkan dengan landasan teori serta hasil dan temuan penelitian sebelumnya.

Bab V. Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi, dalam bab ini kesimpulan dikemukakan secara umum yaitu melalui uraian padat sebagai usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Kesimpulan juga disajikan dalam bentuk rumusan khusus yang langsung mengarah pada butir-butir sebagai jawaban atas masalah dalam penelitian ini. Bagian ini juga mengemukakan tentang implikasi hasil penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Untuk rekomendasi dalam penelitian ini ditujukan kepada pembuat kebijakan, pengguna dan peneliti berikutnya khususnya yang berkaitan dengan temuan yang pokok dalam penelitian ini.